

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. 1.1 Latar Belakang**

Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan penting dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerah, baik dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah maupun tugas pembangunan. Dapat dikatakan penting karena tanpa pajak daerah maka otonomi daerah tidak dapat terselenggara secara nyata dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sudah sewajarnya pemerintah daerah secara terus-menerus mengadakan pemikiran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan hal tersebut jelas diketahui bahwa salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari pajak daerah.

Kantor SAMSAT sebagai organisasi pelaksana tugas membuat atau merancang konsep-konsep untuk menggerakkan segala kemampuan agar dapat melaksanakan tugas pengutipan pajak kendaraan bermotor secara efektif, maka SAMSAT harus memiliki aparatur yang ahli dalam bidangnya, seperti kemampuan mengidentifikasi dan mengelompokkan pekerjaan, menyiapkan karyawan untuk menangani pelaksanaan tugas-tugas, mengetahui wewenang dan tanggung jawab, serta menyusun mekanisme koordinasi kepala antar unit kegiatan.

Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan pekerjaan rutin tahunan bagi para pemilik kendaraan bermotor. Orang yang dikenakan pemungutan pajak disebut wajib pajak. Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak merupakan badan/lembaga maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa hukum badan tersebut. Dalam menjalankan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor, wajib pajak harus mengetahui dengan jelas mekanisme pelaksanaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, serta memerlukan sarana administrasi yang jelas untuk menyampaikan serta memenuhi kewajiban tersebut.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, dalam pelaksanaan pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Surabaya Utara, saat ini masih banyak wajib pajak yang kurang mengerti atau sedikit pengetahuannya mengenai mekanisme dalam pelaksanaan pembayaran pajak dan menganggap bahwa pelaksanaan pembayaran pajak yang dilakukan pada kantor SAMSAT terkesan sulit dan ribet, sehingga membuat para wajib pajak terkadang malas untuk membayar pajaknya sendiri ke kantor SAMSAT. Hal tersebut menyebabkan tidak sedikit wajib pajak yang akhirnya menggunakan jasa calo untuk melakukan pembayaran pajak, padahal biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa calo tersebut tidaklah sedikit tergantung permintaan para calo. Sebenarnya pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan pada kantor SAMSAT tidak begitu sulit bagi yang sudah terbiasa membayar pajak sendiri tetapi bagi

yang baru mencoba membayar pajak kendaraan bermotor sendiri pasti berpikir, apa yang harus dibawa, gimana urutan dan caranya. Hal pertama yang harus dilakukan jika ingin membayar pajak kendaraan bermotor adalah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan seperti KTP asli, BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) asli, STNK Asli, foto kopi masing-masing satu (KTP, BPKB, dan STNK).

Dengan mengetahui dan menguasai mekanisme pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor, maka diharapkan tidak terjadinya kesalahan maupun ketimpangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya baik dalam melakukan penghitungan Pajak Kendaraan bermotor serta sistem administrasinya. Besarnya pajak yang harus dibayar untuk setiap kendaraan bermotor berbeda-beda tergantung pada golongan/jenis kendaraan bermotor apakah jenis mobil, sepeda motor, beca motor, ataupun alat berat.

Besarnya pajak kendaraan bermotor ditentukan dari berbagai faktor. Jika ingin mengetahui besarnya pajak kendaraan bermotor cukup lihat nilai pajak yang tertera di STNK kendaraan bermotor. Seringkali memiliki 1 kendaraan saja belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena itu membeli kendaraan pribadi yang baru terdengar seperti sebuah solusi, namun juga mempertimbangkan pajak kendaraan bermotor progresif tersebut. Semakin banyak kendaraan pribadi yang dimiliki seseorang maka semakin besar pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan. Sistem ini serupa dengan pajak penghasilan (Pph) yang bersifat progresif. Semakin besar penghasilan yang didapatkan maka semakin besar pajak yang harus dibayar. Syarat terkena pajak kendaraan bermotor progresif jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan dengan nama dan alamat yang sama.

Walaupun kendaraan tersebut sudah tidak digunakan tetapi nama dan alamat pemiliknya masih tetap sama.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat judul mengenai **“Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Surabaya Utara”**.

## **2. 1.2 Tujuan Studi Lapang**

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam studi lapang ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Surabaya Utara.
2. Untuk mengetahui data penerimaan realisasi pajak kendaraan bermotor pada kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Surabaya Utara.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program D3 Manajemen Perpajakan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya (STIESIA) Surabaya.

## **3. 1.3 Manfaat Studi Lapang**

Dari penelitian yang dilakukan, penulis berharap memberikan manfaat bagi :

1. Penulis

Penelitian ini berguna sebagai pengetahuan bagaimana mekanisme dan tata cara pelaksanaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Surabaya

Utara.

## 2. Pembaca

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai penambah pengetahuan dan pemahaman tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Surabaya Utara.

## 3. Perusahaan

Penelitian ini sebagai kerja sama antara lembaga pendidikan dengan instansi pemerintah dan sebagai salah satu sarana untuk menyebar luaskan informasi mengenai Pajak Kendaraan Bermotor.

## 4. **1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang**

Ruang lingkup adalah suatu batasan yang memudahkan penulis agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dibahas, maka ruang lingkup Studi lapang yang akan dikaji adalah mekanisme pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama Samsat Surabaya Utara.

## 5. **1.5 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung kepada obyek yang diteliti ditempat penulis melakukan praktek kerja lapang.

2. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber, ini dilakukan untuk memperoleh suatu informasi yang tepat dan jelas.
3. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengambil dokumen atau data-data ditempat praktik kerja lapang untuk dijadikan acuan mengerjakan Tugas Akhir.

